

The logo of Universitas Negeri Medan is a circular emblem. It features a central sun with rays, a lotus flower below it, and a book at the bottom. The text 'UNIVERSITAS NEGERI MEDAN' is written around the top inner edge of the circle.

# BAB V

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK  
DAN SEKOLAH DASAR  
2005-2009

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

## PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 2005-2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 4 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dana pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai fungsi dan tujuan utama pembiayaan pendidikan serta komitmen pemerintah, prioritas pembiayaan pembangunan pendidikan TK dan SD diberikan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan pendidikan pada daerah miskin, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah yang terkena konflik dan bencana alam; serta kelompok/masyarakat termarginalkan dan pendidikan inklusif;
- b. Memperkuat pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dengan kemampuan fiskal yang rendah;
- c. Pemberdayaan satuan pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan;

- d. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan melalui perangkat organisasi komite sekolah dan dewan pendidikan; serta
- e. Melaksanakan komitmen Internasional di bidang pendidikan dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*), pendidikan untuk semua (*Education for All/EfA*).

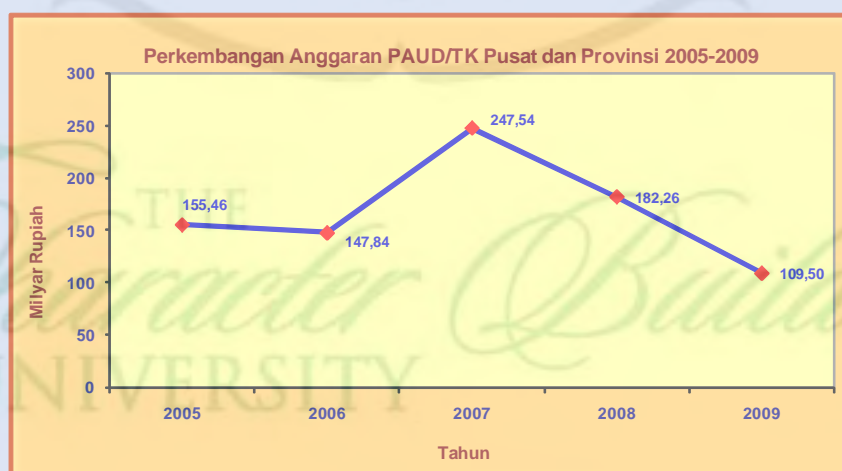
## A Pendanaan Pembangunan TK dan SD Melalui Dana APBN Dikelola Pusat dan Provinsi

Berikut ini disajikan perkembangan pendanaan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar tahun 2005-2009 yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh pusat dan provinsi.

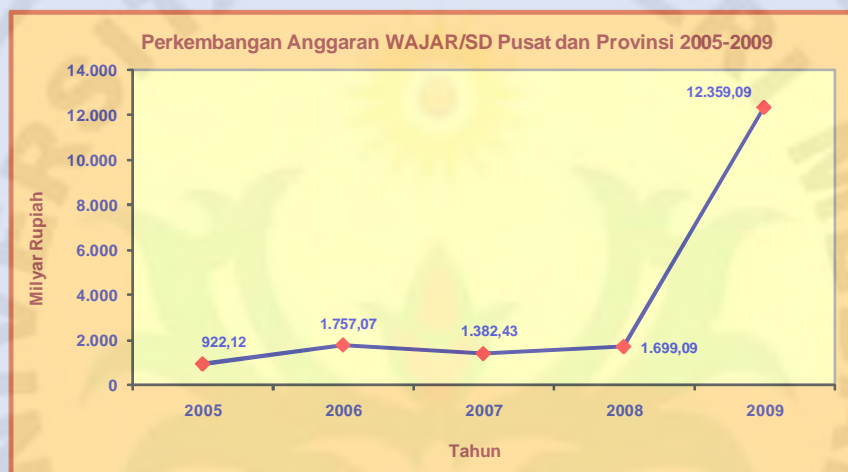
**Tabel 5.1.** Perkembangan Anggaran Pusat dan Provinsi Direktorat Pembinaan TK dan SD Tahun 2005-2009

| Anggaran Pusat dan Provinsi Tiap Tahun (Milyar Rupiah) |        |          |          |          |           |
|--|--------|----------|----------|----------|-----------|
| Program  | 2005   | 2006     | 2007     | 2008     | 2009      |
| PAUD/TK  | 155.46 | 147.84   | 247.54   | 182.26   | 109.50    |
| WAJAR/SD   | 922.12 | 1,757.07 | 1,382.43 | 1,699.09 | 12,359.09 |

Perkembangan anggaran pusat dan daerah program pendidikan anak usia dini jalur formal (TK) sebagaimana nampak pada grafik di bawah ini menunjukkan kecenderungan menurun. Sedangkan untuk program wajar, pendanaan tahun 2005-2008 cenderung konstan.



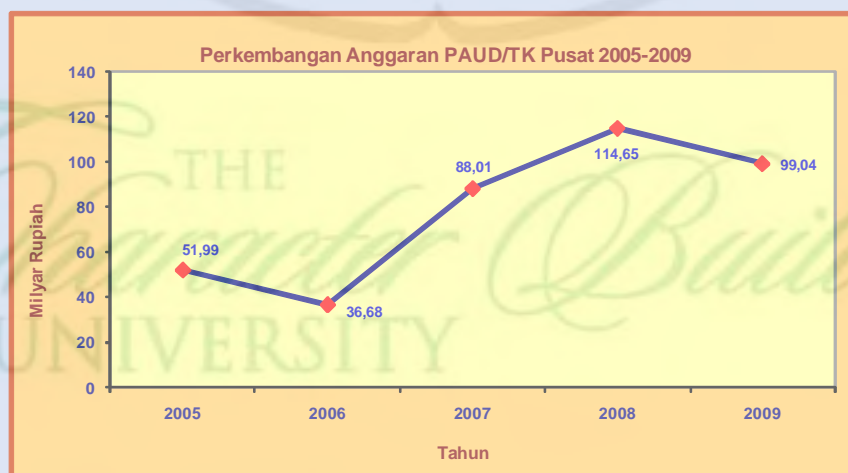
Lonjakan anggaran terjadi pada tahun 2009. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Pembinaan SMP. Mulai tahun 2009 BOS SD dikelola oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD.



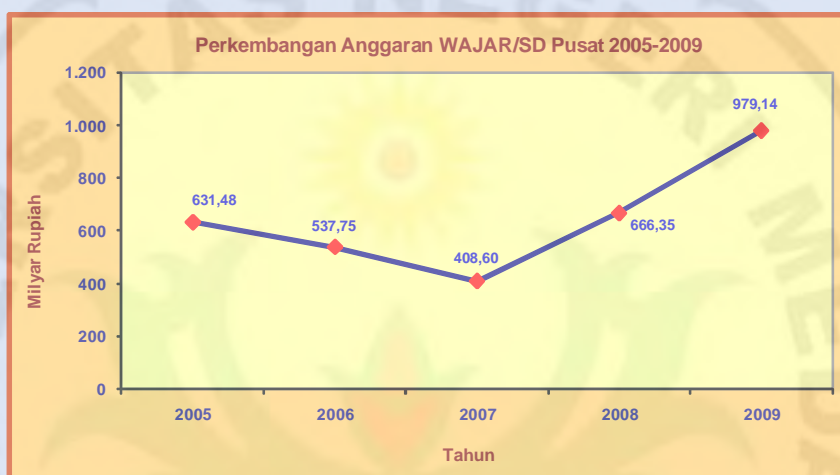
**Tabel 5.2.** Perkembangan Anggaran Pusat Direktorat Pembinaan TK dan SD Tahun 2005-2009

| Program  | Anggaran Pusat Tiap Tahun (Milyar Rupiah) |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|
|          | 2005                                      | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
| PAUD/TK  | 51.99                                     | 36.68  | 88.01  | 114.65 | 99.04  |
| WAJAR/SD | 631.48                                    | 537.75 | 408.60 | 666.35 | 979.14 |

Perkembangan anggaran pusat program pendidikan anak usia dini jalur formal (TK) sebagaimana nampak pada grafik di bawah menunjukkan grafik yang fluktuatif.



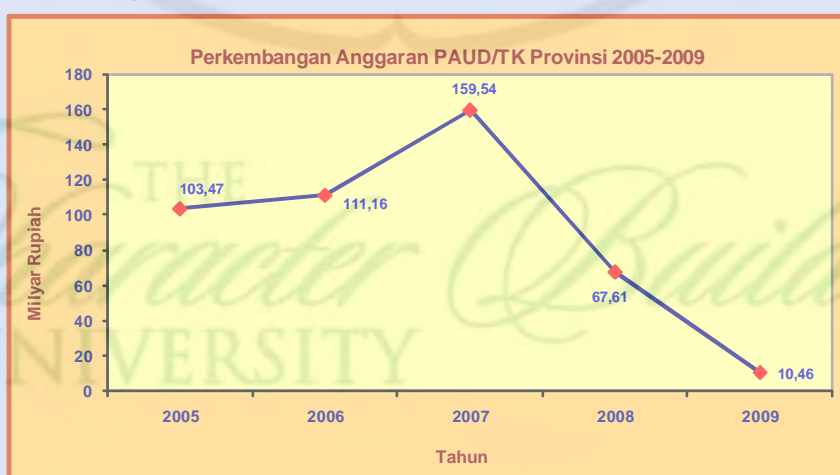
Sedangkan untuk program wajar, pendanaan tahun 2005-2007 menunjukkan kecenderungan turun dan 2007-2009 menunjukkan kenaikan.



**Tabel 5.3.** Perkembangan Anggaran Pusat dan Provinsi Direktorat Pembinaan TK dan SD Tahun 2005-2009

| Program  | Anggaran Provinsi Tiap Tahun (Milyar Rupiah) |          |        |          |           |
|----------|--|----------|--------|----------|-----------|
|          | 2005   | 2006     | 2007   | 2008     | 2009      |
| PAUD/TK  | 103.47                                       | 111.16   | 159.54 | 67.61    | 10.46     |
| WAJAR/SD | 290.64                                       | 1,219.32 | 973.84 | 1,032.73 | 11,379.95 |

Perkembangan anggaran provinsi program pendidikan anak usia dini jalur formal (TK) sebagaimana nampak pada grafik di bawah ini menunjukkan kecenderungan menurun yang cukup signifikan. Sedangkan untuk program wajar, pendanaan tahun 2005-2008 cenderung konstan.





Lonjakan anggaran terjadi pada tahun 2009. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD yang sebelumnya dikelola oleh Sub Dinas yang membidangi SMP, mulai tahun 2009 dikelola oleh Sub Dinas yang membidangi SD.



## **B** Pendanaan Pembangunan Sekolah Dasar Melalui Dana Alokasi Khusus, Dikelola oleh Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

Salah satu bidang sasaran pembangunan nasional melalui DAK adalah bidang pendidikan yang kegiatannya ditujukan untuk menunjang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. DAK bidang pendidikan dimulai dari tahun 2003 digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas sekolah dasar yang mengalami kerusakan serta untuk menyediakan sarana peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Khusus 2005-2009.

**Tabel 5.4.** Perkembangan Anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun 2005-2009 (dalam milyar rupiah)

| 2003-2004<br>(Kondisi Awal) | 2005  | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 1.277,6                     | 1.221 | 2.919,53 | 5.195,29 | 7.074,50 | 9.334,88 |

Perkembangan anggaran dana alokasi khusus sebagaimana diperlihatkan pada grafik di bawah ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun.



## C Pendanaan Biaya Operasional Sekolah, Dikelola oleh Sekolah

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Tabel berikut ini menggambarkan pendanaan BOS tahun 2005-2009.

**Tabel 5.5.** Perkembangan Anggaran BOS SD Tahun 2005-2009 (dalam trilyun rupiah)

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009  |
|------|------|------|------|-------|
| 3,39 | 6,83 | 7,05 | 7,26 | 10,68 |

Perkembangan anggaran BOS sekolah dasar sebagaimana diperlihatkan pada grafik di bawah ini menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Anggaran BOS tahun 2005 yang lebih kecil dari anggaran tahun berikutnya karena pada tahun 2005 program BOS hanya dialokasikan untuk Juli-Desember 2009. Sementara itu lonjakan signifikan anggaran BOS terjadi pada tahun kelima, dari Rp 7,26 trilyun tahun 2008 menjadi Rp 10,68 trilyun pada tahun 2009. Kenaikan tersebut terjadi karena *unit cost* BOS siswa per tahun dinaikan dari Rp 235 ribu per anak pertahun menjadi Rp 397 ribu per anak per tahun untuk Kabupaten dan Rp 400 ribu per anak per tahun untuk Kota.



Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20 persen anggaran untuk pendidikan. Dengan kenaikan ini maka tujuan BOS tahun 2009 dirubah menjadi: (1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; (2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI); dan (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.





Direktur Pembinaan TK dan SD, Mudjito AK (*kedua dari kiri*) didampingi para Kasubdit saat acara FLS2N tahun 2009 di Yogyakarta.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY